

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm. 47-48

D.Y. Witanto, SH., 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Prestasi Pustakaraya: Jakarta, hlm.222.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya*, (Bandung, Refika Aditama, 2012) hal 22.

Ishaq, 2015. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta. Bandung, hlm.20.

Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan pedoman bagi (calon) suami isteri*, (Jakarta: Rana Pustaka, 2012), hal. 8,

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2016

Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika: Jakarta, Hlm. 5.  
Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 68.

### B. Sumber Internet

1. <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt583e9ba62c691/bisakah-membuat-perjanjian-kawin-setelah-perkawinan-berlangsung-ipostnuptial-agreement-i/> diakses pada tanggal 30 oktober 2020
2. <http://alwesius.blogspot.com/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html?m=1> di akses pada tanggal 4 april 2021
3. [324996-analisis-yuridis-atas-perjanjian-perkawi-26e3da06.pdf](#) diakses pada 12 juli 2021
4. di akses pada tanggal 13 juli 2021

5. <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/dampak-putusan-mahkamah-konstitusi-no-no-69puuxii2015-terhadap-hukum-perkawinan-dan-hak-kebendaan-di-indonesia/> di akses pada tanggal 9 juli 2021

### **C. Undang Undang**

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan
3. Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015
4. Penetapan PN Surabaya No.1082/Pdt.P/2016/PN.Sby
5. Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang batas usia perkawinan
6. PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
7. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris